

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Greenpeace menginternasionalisasikan isu deforestasi hutan hujan Papua melalui jalur-jalur aktivisme transnasional. Berdasarkan analisis menggunakan konsep *Pathway of Transnational Activism* yang dikembangkan oleh Zajak, penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace tidak mengandalkan satu bentuk advokasi tertentu dalam menjalankan kampanyenya, melainkan memanfaatkan kombinasi berbagai jalur aktivisme yang saling melengkapi untuk memperluas perhatian internasional terhadap isu deforestasi Papua. Strategi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan forum organisasi internasional, tekanan terhadap aktor negara, mobilisasi aktor pasar, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil sebagai satu kesatuan strategi kampanye transnasional. Dengan demikian, internasionalisasi isu deforestasi hutan hujan Papua tidak dibangun melalui tekanan langsung terhadap pemerintah Indonesia semata, melainkan melalui pembentukan perhatian, legitimasi, dan tekanan internasional yang berkembang secara bertahap melalui berbagai aktor lintas batas.

Melalui *international-organizational pathway*, Greenpeace memanfaatkan forum-forum internasional sebagai ruang untuk mengangkat isu deforestasi Hutan hujan Papua ke dalam agenda lingkungan global. Keterlibatan Greenpeace dalam berbagai forum seperti *Conference of the Parties* (COP), mekanisme *Convention on Biological Diversity* (CBD), serta forum regional menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, tetapi juga berupaya membangun kesamaan persepsi di antara negara-

negara dan aktor internasional mengenai pentingnya perlindungan Hutan hujan Papua. Laporan investigatif, data ilmiah, dan aktivitas diplomasi non-negara dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan kondisi deforestasi Papua dengan komitmen internasional mengenai perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta hak masyarakat adat. Melalui strategi tersebut, Greenpeace berhasil mentransformasikan isu yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan domestik menjadi bagian dari diskursus lingkungan global sehingga membuka ruang bagi terbentuknya tekanan normatif terhadap pemerintah Indonesia.

Pada *bilateral pathway*, penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace mengarahkan tekanan secara langsung kepada pemerintah Indonesia melalui berbagai bentuk advokasi kebijakan yang melibatkan negara lain dengan hubungan bilateral dengan Indonesia. Greenpeace tidak menempatkan negara lain sebagai pihak yang mengintervensi urusan domestik Indonesia, melainkan sebagai aktor yang dapat memberikan pengaruh politik melalui hubungan bilateral, komitmen lingkungan internasional, maupun perhatian terhadap implementasi berbagai kesepakatan global. Kritik terhadap proyek-proyek pembangunan yang berpotensi meningkatkan laju deforestasi, seperti perluasan perkebunan skala besar dan Proyek Strategis Nasional di Papua, dipadukan dengan upaya membangun perhatian pemerintah negara lain terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Dengan demikian, jalur bilateral berfungsi sebagai mekanisme untuk memperluas tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia melalui meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap tata kelola lingkungan di Papua.

Sementara itu, melalui *market pathway*, Greenpeace memandang aktor ekonomi sebagai salah satu titik strategis dalam memengaruhi praktik deforestasi Hutan hujan Papua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga menargetkan perusahaan, investor, lembaga keuangan, serta rantai pasok global yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas eksploitasi hutan di Papua. Berbagai laporan investigatif mengenai praktik korporasi, kampanye terhadap merek-merek internasional, serta pemanfaatan instrumen litigasi menunjukkan bahwa tekanan ekonomi digunakan untuk meningkatkan biaya reputasi maupun biaya bisnis bagi perusahaan yang terlibat dalam deforestasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan tata kelola lingkungan tidak hanya diupayakan melalui perubahan kebijakan negara, tetapi juga melalui perubahan perilaku aktor pasar yang menjadi bagian dari jaringan ekonomi global.

Melalui *civil-society pathway*, Greenpeace menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor utama dalam memperluas jangkauan kampanye isu deforestasi Hutan hujan Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace membangun jejaring advokasi dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas masyarakat adat, akademisi, media massa, hingga individu melalui berbagai bentuk kampanye publik, baik secara luring maupun digital. Pemanfaatan media sosial, petisi daring, aksi damai, publikasi laporan investigatif, serta kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil berhasil meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak ekologis dan sosial akibat deforestasi di Papua. Keterlibatan masyarakat sipil tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi kampanye Greenpeace, tetapi juga

menciptakan tekanan sosial yang mendorong isu deforestasi Papua memperoleh perhatian yang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, keempat *pathway* yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses internasionalisasi isu deforestasi Hutan hujan Papua berlangsung melalui mekanisme yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *International-organizational pathway* berperan dalam membangun legitimasi internasional terhadap isu yang diangkat, *bilateral pathway* memperluas tekanan politik melalui hubungan antarnegara, *market pathway* memengaruhi perilaku aktor ekonomi yang terlibat dalam rantai deforestasi, sedangkan *civil-society pathway* memperkuat dukungan publik dan membangun solidaritas transnasional. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep *Pathway of Transnational Activism* yang dikemukakan oleh Zajack relevan dalam menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil transnasional memanfaatkan beragam jalur advokasi secara simultan untuk meningkatkan efektivitas kampanye mereka. Dengan demikian, keberhasilan internasionalisasi suatu isu tidak ditentukan oleh dominasi satu jalur aktivisme, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai *pathway* sesuai karakteristik isu dan aktor yang menjadi sasaran advokasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Greenpeace berhasil menginternasionalisasikan isu deforestasi Hutan hujan Papua melalui strategi kampanye transnasional yang memanfaatkan kombinasi *international-organizational pathway*, *bilateral pathway*, *market pathway*, dan *civil-society pathway*. Keempat jalur tersebut membentuk suatu strategi advokasi yang saling melengkapi dalam meningkatkan visibilitas isu, membangun legitimasi internasional, memperluas jaringan dukungan, serta menciptakan tekanan terhadap

aktor negara maupun non-negara yang memiliki keterkaitan dengan deforestasi di Papua. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa internasionalisasi isu lingkungan tidak hanya bergantung pada kapasitas organisasi dalam memobilisasi opini publik, tetapi juga pada kemampuannya menghubungkan berbagai aktor lintas batas ke dalam satu jaringan advokasi transnasional yang terkoordinasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan peran aktor non-negara dalam politik global, khususnya Greenpeace dalam konteks penelitian ini mampu menjadikan isu lingkungan domestik sebagai bagian dari agenda lingkungan global melalui pemanfaatan berbagai jalur aktivisme transnasional secara terpadu.

